## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI DI INDONESIA PADA PERIODE 2019-2022

## Muliyani Kristina<sup>1</sup>; Dyah Ratnawati<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya<sup>1,2</sup>

Email: 18013010159@student.upnjatim.ac.id<sup>1</sup>; dyahr.ak@upnjatim.ac.id<sup>2</sup>

#### **ABSTRAK**

Di antara tahun 2019 dan 2022, penelitian ini menyelidiki bagaimana pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah berdampak pada efektivitas PAD di tingkat provinsi di Indonesia. Metode kuantitatif digunakan untuk melakukan analisis regresi linear berganda dengan data sekunder dari laporan realisasi anggaran provinsi di seluruh Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap efektivitas PAD. Sebaliknya, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah memiliki dampak negatif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak dapat meningkatkan efektivitas PAD, tetapi bergantung pada sumber pendapatan yang tidak produktif dapat mengganggu kinerja keuangan daerah. Nilai *adjusted* R² yang disesuaikan sebesar 85,8% menunjukkan bahwa variabel yang diteliti dapat sepenuhnya menjelaskan variasi efektivitas PAD. Menurut penelitian ini, pemerintah daerah harus mengoptimalkan kebijakan pajak, meningkatkan efektivitas retribusi, dan mengevaluasi pendapatan non-pajak untuk membuat kerangka fiskal yang lebih stabil dan efisien.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Lain-Lain PAD Yang Sah; Efektivitas PAD

#### **ABSTRACT**

Between 2019 and 2022, this study investigates how local taxes, regional retributions, and other legitimate local own-source revenues affect the effectiveness of Local Own-Source Revenue (PAD) at the provincial level in Indonesia. A quantitative method was used to conduct multiple linear regression analysis with secondary data from provincial budget realization reports across Indonesia. The results show that local taxes have a positive and significant impact on the effectiveness of PAD. Conversely, regional retributions and other legitimate PAD revenues have a negative and significant impact. This indicates that increasing tax revenues can enhance PAD effectiveness, while reliance on non-productive revenue sources may hinder regional financial performance. The adjusted R² value of 85.8% suggests that the examined variables can largely explain the variation in PAD effectiveness. According to this study, local governments should optimize tax policies, improve the effectiveness of retributions, and evaluate non-tax revenues to establish a more stable and efficient fiscal framework.

Keywords: Regional Original Revenue; Regional Taxes; Regional Retributions; Other Legitimate Local Own-Source Revenues; PAD Effectiveness

#### **PENDAHULUAN**

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menarik pungutan dari masyarakat di wilayahnya. Kewenangan ini diperlukan agar pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, baik dari sisi pemerintahan maupun pembiayaan kegiatan pembangunan. Penerapan kebijakan otonomi daerah secara efektif dimulai sejak 1 Januari 2001, didasarkan pada komitmen pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui beberapa regulasi penting, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran, serta pengelolaan aset milik daerah, dimasukkan ke dalam pengelolaan keuangan daerah dalam konteks ini.

Tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merefleksikan kapasitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal guna membiayai berbagai kebutuhan pembangunan tanpa sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, PAD memiliki peran strategis dalam menilai kesuksesan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara independen. Menurut Mardiasmo (2018), PAD mencakup penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, serta jenis lain-lain PAD yang sah.

Selama 2019–2022, pemerintah daerah menghadapi banyak masalah untuk mengoptimalkan PAD, terutama karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada awal 2020. Pandemi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi global dan nasional, termasuk Indonesia. Banyak sektor ekonomi yang bertanggung jawab atas PAD, seperti perdagangan, pariwisata, dan industri, mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen, yang berdampak pada penurunan PAD di berbagai wilayah (Badan Pusat Statistik, 2021). Dalam keadaan seperti ini, pemerintah daerah harus mengambil tindakan yang direncanakan untuk menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan efektivitas PAD. Efektivitas tidak hanya mencerminkan kemampuan

teknis dalam menghimpun pendapatan, tetapi juga mencerminkan efisiensi kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Priyanti dkk. (2019) dan Paturochman (2020) menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah memengaruhi PAD secara signifikan.. Namun, studi dari Juwita (2023) dan Nina Noviani dkk. (2024) menunjukkan hasil berbeda, bahwa beberapa komponen PAD tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas PAD. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa kontribusi setiap komponen PAD sangat bergantung pada konteks area dan waktu tertentu.

Didasarkan pada latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi untuk sejumlah masalah yang berkaitan dengan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Indonesia. Fokus utamanya adalah menganalisis apakah pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas PAD provinsi-provinsi di Indonesia selama periode 2019–2022. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti kuantitatif tentang bagaimana masing-masing sumber PAD membantu kemandirian fiskal daerah, serta mengkonfirmasi relevansi teori agensi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

#### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### Teori Agensi

Konsep yang disebut "teori agensi" menjelaskan hubungan kontrak antara agens dan prinsipal. Pihak pengambil keputusan adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk melakukan tugas atas nama pengambil keputusan dalam posisi mereka sebagai pengambil keputusan. Kontrak yang disebut "hubungan keagenan" melibatkan satu atau lebih prinsipal memerintah satu atau lebih agen untuk melakukan sesuatu atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk melakukannya (Jensen & Meckling, 1976).

Terkait dengan penelitian ini, teori agensi menjadi landasan untuk memahami bagaimana pemerintah daerah sebagai agen menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola dan merealisasikan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efektif. Efektivitas PAD menunjukkan seberapa baik agen mampu menjalankan mandat dari prinsipal secara transparan, akuntabel, dan efisien. Ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola PAD dapat menimbulkan

konflik kepentingan dan asimetri informasi, yang menjadi inti persoalan dalam teori agensi.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi daerah yang mendorong investasi dan ekonomi. Di era otonomi daerah, pemerintah daerah diwajibkan untuk meningkatkan pendapatan melalui inovasi sistem. Menurut Halim (2021), Seluruh penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi lokal disebut PAD. Komponen PAD meliputi: (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain PAD yang sah. Selain dana perimbangan, pinjaman daerah, dan sisa anggaran tahun sebelumnya, PAD umumnya merupakan komponen dari sumber penerimaan keuangan daerah.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah adalah ukuran seberapa baik pemerintah daerah dapat mencapai target pendapatan yang telah direncanakan dengan melihat potensi riil daerah (Halim, 2021). Rasio efektivitas dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD terhadap target yang ditetapkan. Suatu daerah dikatakan efektif dalam pengelolaan PAD jika rasio ini mencapai minimal 100%. Rasio efektivitas pemerintah daerah sebanding dengan kinerjanya.

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tanpa imbalan langsung (Halim, 2021). Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 mendukung pengertian ini. Salah satu sumber utama penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah, yang digunakan untuk membiayai berbagai proyek seperti penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur, serta layanan publik lainnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, masyarakat harus lebih sadar untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan untuk kepentingan badan atau individu. Dengan demikian,

retribusi daerah merupakan kontribusi masyarakat atas pemanfaatan layanan atau fasilitas khusus dari pemerintah daerah (Mahmudi, 2010).

## Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggap sebagai lain-lain PAD yang sah. Komponen penerimaan ini termasuk komisi atau potongan dari pengadaan barang dan jasa, keuntungan dari selisih nilai tukar, keuntungan dari bunga, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan (Halim, 2021). Dengan demikian, lain-lain PAD yang sah berfungsi sebagai sumber penerimaan penerimaan pelengkap yang bersifat legal dan mendukung pendanaan daerah.

### Hubungan antara Pajak Daerah dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Salah satu komponen penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah, yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program kerja, seperti pembukaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur, serta pelayanan publik lainnya. Pajak daerah, sebagai kontribusi wajib dari masyarakat, menjadi sumber pendapatan yang signifikan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan penelitian Sartika dkk. (2019) menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, hipotesis pertama dari penelitian ini adalah bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap seberapa efektif PAD.

H<sub>1</sub>: Pajak Daerah berpengaruh terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

## Hubungan antara Retribusi Daerah dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Retribusi daerah dan pajak daerah merupakan dua jenis penerimaan yang samasama bersifat wajib dan dikenakan kepada masyarakat, namun memiliki perbedaan mendasar dalam hal dasar pengenaan serta manfaat yang diperoleh. Keduanya membantu pemerintah daerah membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Retribusi daerah adalah pungutan yang dibayar kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir, dan retribusi perizinan tertentu. Pajak daerah dikenakan tanpa imbalan langsung. Pengaruh pengelolaan retribusi daerah terhadap PAD sangat

besar, terutama dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2018) menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap PAD, yang mengindikasikan

bahwa optimalisasi retribusi dapat menjadi strategi penting dalam memperkuat

kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan temuan ini, hipotesis kedua penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut: retribusi daerah mempengaruhi efektivitas Pendapatan Asli

Daerah.

H<sub>2</sub>: Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Hubungan antara Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Efektivitas

Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, seperti penjualan aset, jasa giro, bunga, selisih kurs, dan komisi dari pengadaan barang/jasa. Berdasarkan penelitian Manik & Fitri (2023) serta Khoryani & Dharmawan (2025), jenis pendapatan ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dalam penelitian ini diasumsikan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap efektivitas PAD.

H<sub>3</sub>: Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditujukan untuk melihat pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikaji melalui pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal pada tingkat provinsi di Indonesia selama periode 2019–2022. Seluruh provinsi di Indonesia dijadikan sampel (sebanyak 34 provinsi) dengan teknik sensus. Data sekunder yang digunakan berasal dari situs web resmi 34 pemerintah provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pusat Statistik.

Pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah lainnya adalah variabel independen dalam penelitian ini. Sementara itu, variabel dependen adalah efektivitas PAD, yang diukur melalui rasio realisasi terhadap target PAD. Regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis. Ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 27. Untuk memastikan kelayakan model, sebelum pengujian regresi,

dilakukan uji asumsi klasik: normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi.

#### HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif dari variabel penelitian selama 2019–2022. Pajak Daerah (X1) memiliki rata-rata sebesar Rp4.149,64 miliar dengan standar deviasi Rp7.319,02 miliar, menunjukkan variasi yang tinggi antarprovinsi. Retribusi Daerah (X2) rata-rata sebesar Rp54,52 miliar dan simpangan baku Rp115,06 miliar, juga mengindikasikan ketimpangan cukup besar. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (X3) memiliki rata-rata Rp342,65 miliar dan deviasi Rp801,10 miliar, mencerminkan perbedaan pengelolaan antarwilayah. Sebaliknya, Efektivitas PAD (Y) memiliki rata-rata 100,88% dengan deviasi 13,92%, menunjukkan distribusi yang lebih stabil antarprovinsi.

Dalam interpretasi model regresi dengan distribusi data normal, nilai *asymptotic significance* (2-tailed) lebih besar dari 0,05, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 2. Hasil dari Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel penelitian bebas dari masalah multikolinieritas karena setiap variabel memiliki nilai tolerance di atas 0,1 atau nilai VIF kurang dari 10. Kemudian, pada tabel 4 menunjukkan hasil uji glejser untuk tiap variabel memiliki nilai significance di atas 0,05 yang berarti tidak memiliki masalah heterokedastisitas. Tabel 5 memperlihatkan hasil uji run test menunjukkan nilai asymptotic significance lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan variabel penelitian terbebas dari masalah autokorelasi.

Hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 101,909 menggambarkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka efektivitas PAD diperkirakan sebesar nilai tersebut. Koefisien pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) masing-masing bernilai negatif, yaitu sebesar -0,117 dan -0,101, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pada kedua variabel tersebut justru berkorelasi negatif terhadap efektivitas PAD. Hal serupa juga terjadi pada variabel lain-lain pendapatan daerah yang sah (X3) dengan koefisien -0,093, menunjukkan arah hubungan yang juga negatif. Dengan demikian, seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh negatif terhadap efektivitas PAD pada tingkat provinsi di Indonesia selama periode 2019–2022.

Tabel 7 menunjukkan nilai F hitung sebesar 0,899 dengan probabilitas 0,443 menunjukkan bahwa variabel pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (X3) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y). Sementara itu, Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,858 atau 85,8%, yang berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan 85,8% variasi dari efektivitas PAD, sedangkan sisanya sebesar 14,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel lain seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan guna memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap efektivitas PAD. Hasil uji parsial (uji t) pada tabel 9 menunjukkan bahwa pajak daerah (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas PAD. Di sisi lain, retribusi daerah (X2) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (X3) memiliki nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,049 dan 0,153, yang berada di atas ambang signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas PAD.

#### Pembahasan

### Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Efektivitas PAD

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memengaruhi efektivitas PAD secara signifikan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05), yang menunjukkan bahwa hipotesis awal diterima. Temuan ini selaras dengan penelitian Sartika dkk. (2019), Mulatsih dkk. (2022), Dewi dkk. (2023) dan Dinata dkk. (2024), namun bertentangan dengan Manalu dkk. (2023) yang menyatakan sebaliknya. Pajak daerah, seperti PKB, BBNKB, PBBKB, dan pajak rokok, tetap memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD meskipun di masa pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola pungutan pajak secara efektif dan bertanggung jawab, sesuai dengan konsep teori agensi, di mana pemerintah sebagai agen dapat menjalankan mandat masyarakat (prinsipal) dengan baik. Efektivitas PAD juga mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri, yang harus ditunjang oleh sistem pengendalian internal yang kuat untuk mencegah penyimpangan.

### Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Efektivitas PAD

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa, dengan nilai signifikansi 0,049 (> 0,05), retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas PAD, sehingga hipotesis kedua ditolak. Hasilnya sejalan dengan Widajanto (2018) dan Dinata dkk. (2024), namun bertentangan dengan hasil studi Harefa & Tampubolon (2021) serta Astuti & Kartika (2024) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan. Retribusi daerah adalah pungutan untuk layanan atau jasa publik tertentu yang diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah. Berbeda dengan pajak, retribusi bersifat timbal balik langsung, seperti retribusi atas perizinan atau pengujian kendaraan. Meskipun pandemi COVID-19 berdampak luas, pengaruhnya terhadap retribusi cenderung kecil karena layanan yang dikenai retribusi bukanlah kebutuhan pokok. Dari sudut pandang teori agensi, hasil ini menunjukkan perlunya peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola retribusi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai pihak prinsipal.

## Pengaruh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Efektivitas PAD

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa, dengan nilai signifikansi sebesar 0,153 (> 0,05), hipotesis ditolak karena variabel lain-lain PAD yang sah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas PAD. Temuan ini konsisten dengan penelitian Sri Mulyani & Ramdini (2021), namun berbeda dari hasil Martini dkk. (2022) yang menunjukkan pengaruh positif. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan insidental seperti hibah, denda administratif, atau hasil pengelolaan aset yang tidak bersifat rutin. Selama masa pandemi COVID-19, fokus anggaran pemerintah daerah lebih diarahkan untuk penanganan krisis, sehingga potensi kontribusi dari pendapatan ini terhadap efektivitas PAD menjadi terbatas. Dalam perspektif teori agensi, hasil ini tetap mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai agen masyarakat dalam mengelola sumber daya publik secara optimal di tengah keterbatasan situasional.

#### **KESIMPULAN**

Studi Ini menemukan bahwa retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh negatif terhadap PAD. Sebaliknya, pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD. Menurut temuan ini, pemungutan pajak daerah telah dikelola secara lebih optimal oleh pemerintah daerah dalam mendukung kemandirian fiskal. Namun

demikian, pengelolaan retribusi serta sumber penerimaan lainnya masih belum efektif, yang bisa disebabkan oleh kendala dalam pelaksanaan kebijakan, sistem administrasi, atau kurangnya partisipasi wajib retribusi.

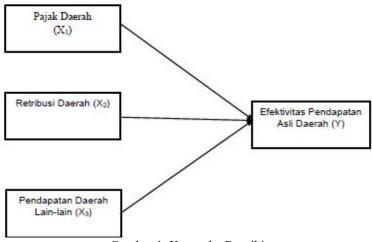
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis tersebut, mempertimbangkan penggunaan pendekatan campuran, yakni metode kuantitatif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mendalam terkait upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD. Selain itu, dengan nilai Adjusted R² yang masih menyisakan sekitar 20% pengaruh dari variabel lain yang belum dianalisis, maka penelitian berikutnya disarankan untuk menambahkan variabel seperti ukuran pemerintah daerah, sistem pengendalian internal, dan tingkat inflasi, yang berpotensi memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas PAD.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, H. E., & Kartika, S. E. (2024). Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Pajak dan Retribusi Daerah: Studi Empiris di Jawa Tengah. *eCo-Fin*, *6*(2), 422–429. https://doi.org/10.32877/ef.v6i2.1432
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020*. *www.bps.go.id*. Jakarta. Diambil dari https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html
- Dewi, S. M., Kurnia, D., & Haryadi, E. (2023). Pengaruh Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Banten. "*LAWSUIT*" *Jurnal Perpajakan*, 2(2), 83–94. https://doi.org/10.30656/lawsuit.v2i2.1395
- Dinata, M. S., Aprilia, N. A., Yudhasamara, S. P., & Susilo, D. E. (2024). Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023. *MAJALAH ILMIAH CAHAYA ILMU*, *6*(1), 21–38. https://doi.org/https://doi.org/10.37849/mici.v6i1.407
- Gunawan, E. (2018). Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 2(1), 1–54.
- Halim, A. (2021). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (5 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Harefa, K., & Tampubolon, K. (2021). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2020). *JAKPI Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 9(2). https://doi.org/10.24114/jakpi.v9i2.27804
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, (4), 77–132. https://doi.org/10.2139/ssrn.94043
- Juwita, R. (2023). The Role of Local Taxes and Local Retributions to Provincial Government Local Own-Source Revenue (Pad) in Indonesia in 2019-2021 (Before and During the Covid-19 Pandemic). *International Journal of Social Science and*

- Human Research, 6(4), 2131–2140. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i4-18
- Khoryani, P., & Dharmawan, N. A. S. (2025). Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Realisasi PAD. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(1), 192–201. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jap.v16i01.93203
- Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN.
- Manalu, S. P. R., Prayogi, O., & Lubis, H. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan Tahun 2013-2021. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *2*(1), 173–191. https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i1.868
- Manik, J., & Fitri, M. (2023). Analisis Efektivitas Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain- Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(1), 9–22. https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i1.21088
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Martini, R., Lorensa, L., & Amri, D. (2022). Pajak Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, dan Belanja Modal: Bukti Empiris Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 271–278. https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.20247
- Mulatsih, Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, C. K. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1900–1911. https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2678
- Nina Noviani, Yudi, & Muhammad Gowon. (2024). Analysis of Effectiveness, Efficiency, and Contribution of Regional Tax Revenue and Regional Levies to Original Regional Income (PAD) of Kerinci Regency Year 2019-2021. *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences*, 2(2), 293–304. https://doi.org/10.55927/ijems.v2i2.8395
- Paturochman, I. R. (2020). Analisis Potensi Pajak Hiburan serta Dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, *1*(2), 132–138. https://doi.org/10.37058/wlfr.v1i2.2093
- Priyanti, T., Noviani Hanum, A., & Wibowo, E. (2019). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2016). *Maksimum*, 8(3), 36. https://doi.org/10.26714/mki.8.3.2018.36-47
- Sartika, D., Ulfa, A., & Ilyas, A. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 32–53.
- Sri Mulyani, H., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *J-Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 151–172. https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613
- Widajanto, M. B. (2018). Peranan Pajak Dan Retribusi Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *JURNAL PENELITIAN EKONOMI DAN AKUNTANSI (JPENSI)*, 3(2), 773–787. https://doi.org/https://doi.org/10.30736/.v3i2.169

### GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Tabel 1. Uii Statistik Deskriptif

Tuoci 1. Oji butubuk Deskripui						
Variabel	N	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Standar deviasi	
Pajak Daerah (X1)	136	4.570,26	290,12	4.149,64	7.319,02	
Retribusi Daerah (X2)	136	806,88	0,49	54,52	115,06	
Lain-lain Pendapatan	136	4.907,21	0	342,65	801,10	
Daerah yang Sah (X3)						
Efektivitas PAD (Y)	136	131,37%	18,67%	100,8758%	13,91985%	

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 2. Uji Kolmogorov-Smirnov

Asymp. Sig. (2-tailed)	Kesimpulan		
0,068	Data berdistribusi normal		

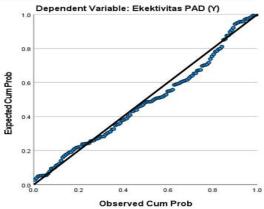
Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics			
	Tolerance	VIF		
X1	0,327	3,507		
X2	0,456	2,194		
X3	0,375	2,667		
Kesimpulan	Tidak terdapat multikolinieritas			

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2. Grafik Normalitas P-Plot

Ta	abel 4. Uji Heterokedastisitas
Variabel	Sig.
X1	0,765
X2	0,268
X3	0,294
Kesimpulan	Tidak terdapat heterokedastisitas

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Asymp. Sig. (2-tailed)	Kesimpulan
0,228	Tidak terdapat autokorelasi

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda

			Coefficients	
Model		Unstandarize	d Coefficients	Standarized Coefficients
		В	Std. Error	Beta
1	(constant)	101,909	1,381	
	X1	-2.222E-13	0.000	-0.117
	X2	-1.219E-11	0.000	-0.101
	X3	1.613E-12	0.000	0.093

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 7. Uji Statistik F

	ANOVA							
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.		
1	Regression	2,835	3	0,945	264,891	0,000		
	Residual	0,471	132	0,004				
	Total	3,306	135					

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

			Model Summary	
Model	R	$R^2$	Adjusted R <sup>2</sup>	Std. Error of The Estimate
1	0,926	0,858	0,854	0,597

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Tabel 9. Uji Statistik T

		Coefficents	Kesimpulan	
	Model	t	Sig.	
1	(Constant)	62,417	0,000	
	X1	-23,387	0.000	Berpengaruh
	X2	1,987	0.049	Tidak berpengaruh
	X3	1,437	0.153	Tidak berpengaruh

Sumber: Data diolah peneliti (2025)